

KESIAPSIAGAAN LEMBAGA PAUD DI BOGOR DALAM MENGHADAPI BENCANA LONGSOR

Aisya Nurul Ramadhani¹⁾, Nurfadilah²⁾

PG PAUD-Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Universitas Al Azhar Indonesia
ramadhaniaisya36@gmail.com

Abstrak : Berdasarkan data kejadian bencana yang telah dihimpun oleh pihak BPPD Bogor, Tanah longsor merupakan bencana yang paling banyak terjadi di daerah Bogor pada tahun 2017. Bahwa program sekolah aman yang diterapkan BPBD Bogor belum dijalankan secara komprehensif di tingkat PAUD, mereka banyak menerapkan di tingkat sekolah dasar (SD) atau madrasah. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan studi kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapsiagaan PAUD dalam menghadapi bencana longsor di satuan PAUD daerah Bogor. Teknik *sampling* yang dipilih adalah *purposive sampling* karena PAUD yang dipilih berdasarkan rekomendasi BPPD Bogor. Keberhasilan program sekolah aman sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, serta partisipasi semua pihak. Oleh karena itu wawancara dilakukan kepada pihak BPBD, guru dan pengelola lembaga PAUD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sekolah aman kedua lembaga baru berada pada tahap pengkajian. Upaya-upaya pengurangan risiko bencana sudah dilakukan pada setiap tahap, baik tahap pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Meskipun demikian, pengetahuan maupun keterampilan terkait kebencanaan, baik untuk peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Lembaga PAUD, kesiapsiagaan, bencana longsor, kerjasama

EARLY CHILDHOOD EDUCATION CENTRE'S (ECEC) PREPAREDNESS FOR LANDSLIDE DISASTER IN BOGOR

Abstract : Based on the data of disaster events that have been collected by the BPPD Bogor, Landslide is the most frequent disaster in Bogor in 2017 (<https://bpbd.kotabogor.go.id/>). At the initial interview it was found that the safe school program implemented by BPBD had not been applied comprehensively at ECEC level, they were mostly implemented at the elementary or madrasah level. This encourages researchers to conduct a qualitative study that aims to determine how ECEC preparedness in Bogor facing the landslide. The sampling technique that has been chosen is purposive sampling because the sample selected based on the recommendation of Bogor BPPD. The success of safe school programs is largely determined by the commitment, cooperation, and participation of all parties. Therefore, the interview was conducted to the BPBD, teachers and headmaster of ECEC. The results of this study indicate that the development of safe schools of both institutions is at the stage of assessment. Disaster risk reduction efforts have been undertaken at every stage, both pre-disaster, during disaster and post-disaster but still the knowledge and skills related to disaster, both for students, educators and education personnel needed to be improved.

Keywords: ECEC, Preparedness, landslide disaster, partnership

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di zona “cincin api” atau “ring of fire”. Kondisi ini membuat Indonesia berpotensi mengalami bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, angin ribut, kebakaran hutan dan jenis bencana lainnya. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis UU RI no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

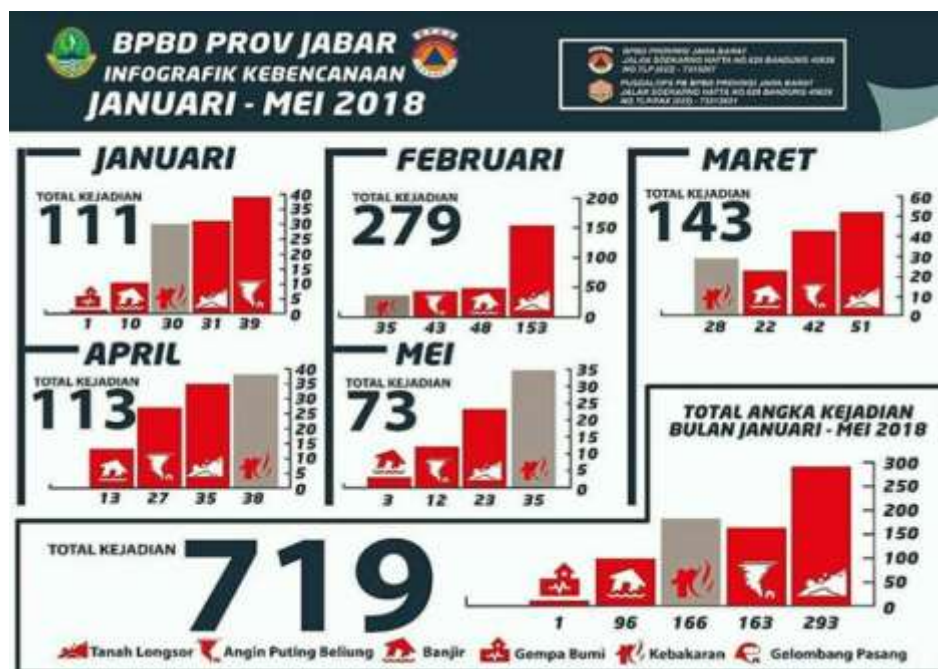
Penanggulangan bencana tidak hanya dititik beratkan pada saat bencana terjadi saja (tanggap darurat) namun juga dilakukan sebelum (pra bencana) dan setelah (pasca bencana). Pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, telah berupaya untuk mengubah pola pikir penanganan bencana menjadi penanggulangan bencana yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya sebelum terjadinya bencana. Menurut Astuti dan Sudaryono (2010) memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketangguhan di semua tingkat merupakan salah satu prioritas penting dalam

mengurangi risiko bencana. Hal ini diperkuat oleh Arifianti (2011), penanggulangan bencana yang baik seharusnya terintegrasi ke dalam sektor pendidikan dan bisa dimulai sejak dini dimulai yaitu anak-anak di jenjang TK-SD sampai jenjang SMP-SMA (Arifianti, 2011).

Program pengurangan risiko bencana di sektor pendidikan sudah dijalankan pemerintah namun terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh berbagai lembaga atau instansi pemerintah dan non-pemerintah, yaitu 1) PRBBS atau Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Sekolah, 2) SSB atau Sekolah Siaga Bencana, 3) SAB atau Sekolah Aman Bencana, 4) SMAB atau Sekolah Madrasah Aman Bencana, 5) SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Meskipun memiliki nama yang berbeda, tujuan program ini adalah sama yaitu menyelamatkan jiwa warga sekolah terutama anak-anak dari ancaman bencana.

Anak usia dini menjadi individu yang rentan ketika bencana sewaktu-waktu terjadi, sehingga salah satu aspek layanan yang tidak boleh terputus dalam kondisi bencana sekalipun adalah layanan Pendidikan bagi anak usia dini. Hal ini telah ditegaskan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, yang menyatakan akan pentingnya penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pembinaan anak usia dini.

Bogor adalah salah satu daerah yang berpotensi gempa yang disertai banjir dan tanah longsor. Berdasarkan data kejadian bencana yang telah dihimpun oleh pihak BPPD Bogor, Tanah longsor merupakan bencana yang paling banyak terjadi di daerah Bogor pada tahun 2017 (<https://bpbdb.kotabogor.go.id/>). Hal ini ditunjukkan dalam grafik kebencanaan yang terjadi pada bulan Januari-mei 2018 berikut ini :



Pada tahun 2015-2017 Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimplementasikan Sekolah Aman di lima daerah Indonesia, seperti di daerah Jayapura, Morotai, Gorontalo Utara, Kerinci Jambi, dan Bandar Lampung. Sekolah Aman adalah komunitas pembelajaran yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespon pada saat darurat (Peraturan Kepala/Perka BNPB No.4 Tahun 2012). Seiring berjalannya waktu pada tahun 2011 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merehabilitasi ruang kelas Sekolah Aman yang syarat dananya bersumber dari harus ada regulasi dari instansi yang berwenang dari penanggulangan bencana yang dimasukkan ke dalam Peraturan Tahun 2014, isinya lebih mengenai bencana tentang Gempa Bumi dan Tsunami. Namun dengan berjalannya proses, tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjalankan implementasi Sekolah Aman, turut sertanya Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Organisasi Nasional dan Internasional seperti UNICEF (United Nations Emergency Children's Fund), PLAN, YTBI (Yayasan Tanggul Bencana di Indoensia), LPBI NU (Lembaga

Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama), dan lain-lain, dan Lembaga Usaha seperti Indomaret, Alfamart, Sinarmas, dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Bogor melakukan SMAB yaitu Sekolah Madrasah Aman Bencana bagi anak-anak yang terkena bencana. Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman ini bersifat multi-sektor dan membutuhkan kerjasama berbagai pihak (BPBD, 2012). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penanggulangan bencana di tingkat PAUD belum dilakukan secara khusus dan terencana oleh BPBD Bogor. Hal ini mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran kesiapsiagaan lembaga PAUD di Bogor yang berada di daerah rawan longsor.

A. Kajian Pustaka

Kesiapsiagaan bencana longsor merupakan salah satu elemen penting yang harus dipersiapkan oleh guru. Guru memiliki tanggung jawab dan tugas utama memberikan keamanan dan keselamatan bagi anak-anak ketika berada di sekolah. Perilaku proaktif atau inisiatif seorang Guru dapat mengurangi risiko untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini. Guru perlu mempersiapkan kemungkinan yang terjadi dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu Guru perlu merencanakan keadaan darurat terlebih dahulu untuk menangani keadaan darurat dan mendapatkan pelatihan khusus yang diperlukan untuk menghadapi keadaan darurat yang mengancam jiwa saat Bencana Alam sedang terjadi.

Selain guru/pihak sekolah, peran orang tua dan masyarakat juga tidak kalah pentingnya untuk memberi pendidikan mengenai bencana alam sejak dini. Edukasi dini akan menjadi langkah awal masyarakat agar menjadi lebih sadar dan waspada terhadap bencana alam sehingga saat bencana alam datang, diharapkan anak tidak menjadi panik dan bingung. Jika telah tahu harus melakukan apa saat bencana alam datang, setidaknya anak sudah memiliki bekal dan bisa menyelamatkan diri sendiri.

Pentingnya anak-anak harus dilindungi dalam kondisi darurat, karena anak-anak merupakan bagian dari kelompok rentan. Kelompok rentan diberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial oleh guru khususnya ketika anak-anak di sekolah agar anak merasa aman, nyaman, dan terlindungi dari ancaman sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (dalam Astuti, dkk., 2013) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 48 ayat 1 dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Apabila anak usia dini yang terpapar bencana dapat ditangani dengan baik maka hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan pun dapat terpenuhi. Oleh karena itu lembaga PAUD yang berpotensi terpapar bencana perlu merencanakan tindakan apa saja yang perlu dilakukan sebelum, ketika terjadi bencana, dan setelah bencana terjadi (Ariantoni, 2009). Dengan demikian, pengetahuan guru dan anak usia dini dalam menghadapi bencana perlu ditingkatkan, misalnya kemampuan untuk menyelamatkan diri melalui latihan simulasi kesiapsiagaan longsor dan mengenali tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana longsor. Guru juga harus memiliki keterampilan dalam menangani anak pada kondisi darurat serta pemulihan kondisi lingkungan sekolah setelah longsor.

Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan anak-anak. Sekolah yang dicintai anak adalah sekolah yang dapat membuat anak merasa aman dan nyaman dalam kegiatan proses belajar mengajar, sekolah dapat melindungi anak dari ancaman bahaya, kekerasan, bencana dan lainnya. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa pada tumbuh kembangnya (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).

Pengembangan sekolah aman melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Pengkajian
 - a) Nama lembaga dan orang yang berkepentingan dengan sekolah aman
 - b) Jenis dan tingkat ancaman yang potensial melanda sekolah dan lingkungan
 - c) Kerentanan bangunan sekolah
 - d) Sumber energi listrik dan penggunaannya

- e) Kapasitas dan kesiapsiagaannya sekolah untuk menghadapi bencana
- f) Komite bencana dan keselamatan sekolah (KBKS)
- 2. Perencanaan dan Perancangan
 - a) Model Sekolah Impian Aman terhadap bencana
 - b) Perencanaan Program jangka menengah Sekolah Aman
 - c) Peta Perencanaan Rinci (DED) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB)
 - d) Rencana aksi satu tahun pertama
 - e) Ada komite kebencanaan dan keselamatan
- 3. Pembangunan dan Pengembangan
 - a) Strukturnya mengacu pada Permen PU/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara dan Pedoman Teknis Cipta Karya 2006
 - b) Arsitekturnya sesuai dengan SNI
 - c) Sarana dan Prasarana
 - d) Tata ruang
 - e) Tumbuhan
 - f) Ada kegiatan rehabilitasi dan perkuatan bangunan, serta pembangunan sekolah aman terhadap bencana
 - g) Ada prosedur tetap peringatan dini dan evakuasi disertai simulasi
 - h) Ada kegiatan pengembangan kapasitas dan kampanye penyadaran
- 4. Operasional dan Pemeliharaan
 - a) Penyusunan prosedur operasional dan pemeliharaan bangunan
 - b) Monitoring dan evaluasi rutin
 - c) Memastikan peta jalur evakuasi ditempatkan di tempat strategis
 - d) Memastikan tanda jalur evakuasi dipasang
 - e) Penggalangan sumber daya luar dan kemitraan untuk mewujudkan rencana jangka menengah
 - f) Penyusunan kebijakan sekolah bagi berkelanjutan sekolah aman
 - g) Kampanye penyadaran dan peningkatan kapasitas secara rutin

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007). Kesiapsiagaan dilakukan dalam rangka upaya mengelola risiko bencana, sehingga jika telah siaga dampak dari bencana dapat diminimalisir. Kegiatan kesiapsiagaan dimulai dari sebelum, saat terjadi bencana, dan setelah bencana terjadi. Kegiatan tersebut didalamnya berhubungan satu sama lain dan harus dilaksanakan secara bertahap dan terus menerus.

Terdapat tiga tahap dalam menanggulangi bencana (Kemendiknas, 2010), yaitu sebelum (pra) bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah (pasca) bencana terjadi. Tahapan tersebut digambarkan dalam skema berikut ini:



[Sumber: Naskah Policy Paper Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana. Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas, Jakarta, 2009 - Tidak Dipublikasi]

1. Kegiatan Pra Bencana

Kegiatan pra-bencana merupakan serangkaian kegiatan pendidikan dan/atau pembelajaran pada anak usia dini yang berhubungan dengan pemahaman kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kegiatan ini ditujukan untuk mengurangi (mereduksi) potensi bahaya / kerugian yang mungkin timbul ketika bencana. Pendidikan kesiapsiagaan dalam layanan PAUD dilaksanakan pada saat keadaan normal atau sebelum terjadi bencana, dengan tujuan untuk mengurangi risiko bencana, sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan Nasional nomor 70a/MPN tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah (dalam Kemendiknas, 2010). Surat ini ditujukan kepada Kepala Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta ditembuskan ke seluruh Kementerian dan Lembaga terkait. Surat Edaran ini mensyaratkan tiga hal dalam rangka Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dalam Pendidikan, yaitu;

- a) Pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah.
- b) Pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstrakurikuler.
- c) Pembangunan kemitraan dan jaringan antar berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana di sekolah.

2. Kegiatan Saat Terjadi Bencana

Kegiatan tanggap darurat bencana berkaitan dengan segala upaya yang dilakukan melibatkan segenap komponen masyarakat (termasuk pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan relawan) yang berperan aktif dalam menghindari, mengatasi dan menyelamatkan diri terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan bencana secara langsung. Keterlibatan masyarakat ini diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas (rasa tanggung jawab, sikap respek dan kepedulian). Hal ini sekaligus akan memperkuat mobilisasi sumber daya lokal dan mendukung pemeliharaan berbagai pelayanan, termasuk pelayanan pendidikan dalam kondisi darurat, jangka pendek dan jangka panjang.

3. Kegiatan Pasca bencana

Kegiatan pasca bencana merupakan segala upaya yang dilakukan untuk memulihkan (merehabilitasi) dan membangun kembali (merekonstruksi) berbagai akibat yang ditimbulkan setelah bencana terjadi. Upaya pemulihan ditujukan untuk membantu korban memulihkan berbagai kondisi fisik, mental, emosional, sosial dan lingkungan pada kondisi yang relatif normal. Salah satu upaya pasca bencana yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi pasca bencana adalah kegiatan membangun berbagai prasarana ruang (diantaranya adalah ruangan yang ramah dan aman untuk anak). Pembangunan ruangan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan mempromosikan berbagai layanan pada anak seperti layanan pendidikan, kesejahteraan sosial dan keagamaan). Ruangan ini juga diharapkan akan menjadi akses untuk bermain dan belajar dalam memulihkan kondisi psiko-sosial dan trauma sebagai akibat dari bencana.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2005), yang bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana longsor di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di dua Lembaga PAUD daerah Bogor Timur. Lembaga PAUD pertama di Jl Padjajaran No.10 Baranang siang, Bogor Timur lokasinya dekat dengan tebingan dan kali dekat pemukiman warga setempat. Lembaga PAUD ke dua terletak di daerah bantaran sungai Cisadane, Bogor. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti telah melakukan observasi awal. Pada saat observasi tersebut diketahui bahwa lembaga PAUD pertama dan kedua menghentikan pembelajaran pada saat lembaganya terkena bencana longsor.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan data yang dipilih peneliti adalah purposive sampling karena pemilihan lembaga dilakukan oleh BPBD Bogor, yaitu lembaga PAUD yang terletak di daerah rawan longsor. Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada pengelola dan guru PAUD di dua lokasi, berdasarkan ketersediaan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh pihak sekolah.

Pada TK IHH peneliti mewawancarai 2 (dua) orang, yang terdiri atas guru dan kepala Sekolah yang merangkap sebagai guru. Pada TK ABA peneliti mewawancarai 2 (dua) orang, yaitu kepala yayasan dan kepala sekolah yang juga merangkap sebagai pendidik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga PAUD

1. Lokasi lembaga pertama, yaitu TK IHH, berada di Jl Padjajaran No.10 Baranang siang, Bogor Timur. Lembaga ini berada pada Masjid Raya Bogor dekat dengan Kantor BPBD Bogor. Lembaga ini dikatakan rawan mengalami bencana longsor karena terletak dipinggir tebing. TK IHH ini pernah mengalami bencana longsor beberapa tahun lalu kemudian BPBD membantu mengurangi risiko bencana dengan membuat Tembok Penahan Tanah (TPT). Bencana longsor terjadi akibat adanya pergeseran tanah dan cuaca buruk dan mengenai 1 ruang kelas. Setelah kejadian tersebut TK IHH ini disarankan oleh BPBD Bogor untuk relokasi ke daerah yang aman dari bencana longsor, terlebih akses menuju TK IHH dari BPBD Bogor ditempuh dengan berjalan kaki.
2. Lokasi lembaga kedua, yaitu TK ABA, berada di Jl Cisadane Bogor. TK ABA ini berada pada bantaran sungai Cisadane dan berada dibawah pemukiman warga yang berada di belakang tebing sehingga dikatakan berada di daerah rawan mengalami bencana longsor. Apabila terjadi bencana longsor dari pemukiman tersebut, maka akan mengenai TK ABA tersebut. Selain itu di sana tidak ada TPT (Tembok Penahan Tanah). Akses menuju ke TK ABA bisa dengan menggunakan angkutan umum ataupun kendaraan bermotor.

B. Tahap pengembangan sekolah aman

1. Pengkajian
 - a) Nama lembaga dan orang yang berkepentingan dengan sekolah aman
Kedua lembaga sudah memiliki Kepala Yayasan yang bertanggung jawab atas sekolah aman.
 - b) Jenis dan tingkat ancaman yang potensial melanda sekolah dan lingkungan
BPBD Bogor sudah menginformasikan jenis dan tingkat resiko bencana di masing-masing daerah. Menurut BPBD TK IHH memiliki resiko bencana lebih besar dibandingkan TK ABA
 - c) Kerentanan bangunan sekolah
Lokasi TK IHH sangat rentan terhadap bencana longsor karena tembok TK berdampingan dengan TPT.
 - d) Sumber energi listrik dan penggunaannya
Listrik di TK IHH menggunakan sumber energi listrik yang disuplai oleh PLN.
 - e) Kapasitas dan kesiapsiagaan sekolah untuk menghadapi bencana
 - 1) Kapasitas
Pendidik dan tenaga kependidikan telah mendapatkan pelatihan dari BPBD tentang kesiapsiagaan bencana. Adapun tujuan dari pelatihan tersebut adalah:
 - untuk memberikan pemahaman sikap dan perilaku antisipatif terhadap bencana;
 - untuk memberikan pemahaman sikap dan tindakan yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi;
 - untuk memberikan pemahaman tentang tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari, mengurangi dan mengatasi bencana, misalnya menjelaskan simbol-simbol yang ada pada jalur evakuasi.
 - 2) Kesiapsiagaan di lembaga PAUD
 - (a) Kegiatan Pra Bencana
 - (i) Pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah.
Meskipun fokus BPBD Bogor pada pelaksanaan program Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB) bagi anak-anak yang terkena bencana, BPBD juga memberikan dukungan kepada lembaga PAUD berupa:
 - Mendorong pembentukan tim bencana di lingkungan sekolah, yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan.

- Memberikan wawasan atau edukasi kepada anak, seperti memberikan informasi mengenai titik rawan dan titik aman, menonton kartun tentang keluarga yang terkena bencana longsor, mengenalkan bencana dan cara menghadapinya menggunakan gambar dan cerita-cerita pendek
 - memberi himbauan kepada pihak sekolah untuk melakukan reboisasi untuk TPT (Tembok Penahan Tanah)
 - menyiapkan jalur-jalur evakuasi di lembaga PAUD
 - memberikan informasi kepada pihak sekolah maupun masyarakat sekitar tentang peringatan dini sebagai tanda/kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat
- (ii) Pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstrakurikuler.

TK IIIH

- Memberikan pendidikan siaga bencana longsor melalui lagu ataupun cerita-cerita pendek, misalnya untuk mengenal bencana longsor serta mengenali tanda dan memahami penyebab terjadinya bencana longsor.
- Menginformasikan dan menunjukkan jalur evakuasi serta titik kumpul apabila bencana longsor terjadi

TK ABA

- Guru menginformasikan tentang barang apa saja yang harus dibawa pada saat bencana longsor terjadi, seperti Kartu Keluarga, dan data-data penting lainnya
- Memiliki tema bencana dalam kurikulum untuk memberikan pendidikan bencana kepada anak

- (b) Pembangunan kemitraan dan jaringan antar berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana di sekolah.

Kedua lembaga bermitra dengan BNPB dan BPBD Bogor. Selain itu kedua lembaga juga berkerja sama dengan masyarakat dalam hal peringatan dini bencana, evakuasi penyediaan logistik dan menyiapkan fasilitas pengungsian (sekolah dasar dan tenda). Pada TK ABA, ada perluasan jaringan, yaitu bekerjasama dengan gugus PAUD untuk menjalankan program go green sebagai salah satu bentuk pencegahan bencana longsor.

- (c) Kegiatan Saat Terjadi Bencana

Kedua lembaga melakukan

- (i) Penyelamatan dan evakuasi
- (ii) Barang-barang atau dokumen yang penting di simpan pada kantong plastik hitam dan diletakkan ditempat yang aman beserta peralatan sekolah lainnya.

- (d) Kegiatan Pasca bencana

(i) TK IIIH

- Kegiatan pembelajaran dilakukan di area sekolah meskipun tidak bisa optimal
- Guru berupaya memaksimalkan seluruh kemampuannya untuk memberikan kegiatan pemulihan dilakukan secara terus menerus di tengah-tengah keterbatasan yang ada.

(ii) TK ABA

- Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru diluar sekolah, di tempat yang aman
- Guru juga melakukan upaya pemulihan pasca bencana berupa edukasi dan simulasi

- (e) Komite bencana dan keselamatan sekolah (KBKS)

Untuk TK IIIH sudah memiliki komite bencana dari pihak lembaganya sendiri, sedangkan TK ABA belum memiliki KBKS.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) pengembangan sekolah aman kedua lembaga baru berada pada tahap pengkajian.
- 2) TK IHH maupun TK ABA sudah berupaya mengurangi risiko bencana longsor. Berikut beberapa persamaan kegiatan pengurangan risiko bencana:

- a) Pra bencana

Keduanya memiliki kesamaan dalam memperoleh informasi mengenai hal-hal penting yang harus di persiapkan berupa data-data penting (kartu keluarga, setifikat, dan perlengkapan penting sekolah)

- b) Saat bencana

Keduanya sama-sama melakukan penyelamatan dan evakuasi, serta melakukan penyelamatan seperti barang-barang atau dokumen penting.

- c) Pasca bencana

Keduanya berupaya melakukan kegiatan pemulihan pada anak-anak pasca bencana.

Perbedaannya terletak pada :

- a) Pra bencana

Di TK IHH tidak memasukkan tema terkait bencana ke dalam kurikulum sedangkan di TK ABA sudah memasukkan tema bencana ke dalam kurikulum.

- b) Pasca bencana

Lokasi proses belajar mengajar pasca bencana di TK IHH di lakukan di area sekolah yang masih aman sedangkan TK ABA melakukannya di luar sekolah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya-upaya pengurangan risiko bencana sudah dilakukan pada setiap tahap masih perlu ditingkatkan baik untuk peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan, termasuk penguatan kapasitas bersama masyarakat dan mitra.

Daftar Pustaka

- Arifianti, Yukni. 2011. Buku Mengenal Tanah Longsor Sebagai Media Pembelajaran Bencana Sejak Dini. Bulletin Vulkanologi dan Bencana Geologi, Volume 6 Nomor 3
- Astuti, dan Sudaryono. 2010. Peran Sekolah dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana. Jakarta. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, Volume 1 Nomor 1.
- Aditya dan Andina, 2011. Memadukan Pendidikan kesiapsiagaan Bencana Ke Dalam Kebijakan Sekolah. PLAN International. Jakarta
- BNPB. 2012. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. BNPB. Jakarta
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Di Sekolah. Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta